

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar**

APBDes adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi – informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana – rencana program yang dibiayai oleh uang desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.<sup>1</sup>

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes juga merupakan dokumentasi formal hasil kesepakatan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berisi tentang pendapatan dan belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup semua keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDes disusun dengan memperhatikan RPMJDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya. APBDes adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan

---

<sup>1</sup> Yuliansyah dan Rusmianto, “*Akuntansi Desa*”, (Jakarta:Salemba Empat.2015), hal.

Pemerintah Desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan APBDes yang baik, karena dalam hal tersebut akan berdampak pada model penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri.<sup>2</sup>

APBDes juga hal yang pokok dalam pengelolaan pemerintah desa yang terkoordinir dari segi tata kelola pemerintahannya. Baiknya tata kelola dapat dibuktikan dalam proses tahapan pengelolaan APBDes itu sendiri. Apabila proses pengelolaan ini berjalan dengan baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintah desa yang baik pula, karena pengelolaan dilakukan berdasarkan sikap partisipan, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dari hal tersebut akan mengarah kebaikan pemerintah desa dalam tata kelola APBDes.<sup>3</sup>

Dalam pengelolaan APBDes perlu adanya mekanisme yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk kelancaran jalannya dalam mengelola desa. Dimana mekanisme pertama ada penyusunan APBDes, dasar penyusunan RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah (RPJDes) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Kedua,

---

hal. 12 <sup>2</sup> Chabib Soleh, "*Pengelolaan Keuangan Desa*", (Bandung: FOKUSMEDIA, 2014)

hal. 14 <sup>3</sup> Chabib Soleh, "*Pengelolaan Keuangan Desa*", (Bandung: FOKUSMEDIA, 2014)

pelaksanaan APBDes dimana terdapat pelaksanaan anggaran pendapatan desa, pelaksanaan anggaran belanja desa, dan pelaksanaan pembiayaan desa. Ketiga, pertanggungjawaban APBDes, dimana realisasi pelaksanaan APBDes akan dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan dilaporkan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat yang didalamnya terdapat pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.<sup>4</sup>

Pada Desa Ngembul langkah atau tahapan – tahapan yang dilakukan dalam menyusun APBDes setiap tahunnya dengan alur yang sama yaitu yang pertama BPD membentuk tim penyusun terlebih dahulu untuk persiapan untuk tahap perancangan dengan panduan Peraturan Desa (Perdes), kemudian tim penyusun melakukan Musyawarah Dusun (Musdus), setelah memperoleh hasil dari Musdus tim penyusun melakukan pengkajian RKP dan RPJM dan kemudian terbentuklah Rancangan Peraturan Desa. Rancangan tersebut akan dibahas dan disetujui kepala desa bersama BPD dan setelahnya ada musyawarah desa bertujuan menetapkan APBDes. Dan tahap akhir APBDes tersebut akan disetorkan ke kecamatan untuk evaluasi yang dilakukan oleh camat.

Untuk proses menyusun APBDes pemerintah Desa Ngembul juga melibatkan masyarakat, BPD, tim penyusun dengan anggota perangkat desa yang dibagi jadi lima bidang;

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa;

---

<sup>4</sup> Adrian Puspawijaya, “*Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), hal. 141

- 2) Pembangunan;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan;
- 4) Pemberdayaan kemasyarakatan;
- 5) Penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDes sangat berperan penting yaitu terlibat dalam menentukan prioritas usulan melalui musdus dan musdes, pada kegiatan musdus masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, saran maupun pendapat untuk kemajuan desa tetapi tetap atas dasar peraturan desa.

Dalam hal pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah Desa Ngembul telah menjalankan sesuai dengan APBDes yang telah dibuat. Untuk pendapatan Desa Ngembul telah memperoleh dana dari dana, desa, bagi hasil pajak, pendapatan alokasi dana desa, bantuan pemerintah kabupaten, bantuan pemerintah provinsi, hasil usaha desa. Semua pendapatan juga dimasukkan di dalam rekening desa. Dan untuk belanja desa pemerintah desa telah melakukan yang sudah tertuang di APBDes. lalu untuk pembiayaan masyarakat desa pada tahun 2020 hanya mengalokasikan pada kegiatan BUMDes saja sebagai penyertaan modal namun pada tahun 2021 dana pembiayaan di lakukan untuk penyusunan pengurus BUMDes karena di Desa Ngembul BUMDes belum berjalan.

Pertanggungjawaban Desa Ngembul atas pengelolaan APBDes bisa dilihat dari adanya musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD dalam

menentukan semua kegiatan dan kebijakan, dan pertanggungjawab APBDes lain seperti pelaporan telah dilakukan sesuai peraturan maupun petunjuk teknis yang berlaku.

Perubahan APBDes pada pemerintahan Desa Ngembul setiap tahunnya melakukan perubahan dengan alasan karena selalu ada faktor yang menyebabkan pemerintah desa melakukan adanya perubahan. Faktor tersebut adalah adanya kebijakan baru, adanya tambahan anggaran, adanya tambahan kegiatan maupun penggantian kegiatan.

**B. Kendala – Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan Efektivitas Dana Desa Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar**

Berhubung kendala pelaksanaan efektivitas terletak pada proses pengelolaan APBDes berikut adalah kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Ngembul dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes yang sering terjadi setiap tahunnya.

Di dalam menjalankan proses pengelolaan APBDes dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban yang dijalankan berdasarkan peraturan yang ada pemerintah Desa Ngembul masih ada beberapa hal yang menghambat jalannya proses pengelolaan. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah Desa Ngembul di dalam proses penyusunan APBDes sebagai berikut:

- 1) Kesulitan menentukan prioritas kegiatan
- 2) Pagu dana transfer terlambat diterima desa

- 3) Kesulitan membagi anggaran
- 4) Keterbatasan tim penyusun
- 5) Peraturan yang berubah – ubah

Kendala yang dihadapi pemerintah Desa Ngembul di dalam proses pelaksanaan APBDes adalah:

- 1) Adanya perubahan kegiatan
- 2) Adanya perubahan anggaran
- 3) Adanya peraturan baru yang harus dilaksanakan dan merubah APBDes
- 4) Anggaran pendapatan berkurang
- 5) Dana transfer yang lambat

Kendala yang dihadapi pemerintah Desa Ngembul di dalam proses pertanggungjawaban APBDes adalah:

- 1) Keterbatasan sumberdaya manusia pengelola keuangan
- 2) Belum tertib administrasi

Dari kendala – kendala yang dihadapi pemerintah Desa Ngembul bisa dilihat faktor penyebabnya dari faktor internal maupun faktor internal. Faktor internal seperti kesulitan memprioritaskan kegiatan, kesulitan membagi anggaran, keterbatasan tim penyusun, keterbatasan sumberdaya manusia pengelola keuangan serta belum tertibnya administrasi. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan atau pelatihan untuk perangkat desa dalam mengelola APBDes.

Sedangkan faktor eksternal yaitu pagu dana transfer terlambat diterima desa, peraturan yang berubah – ubah, adanya peraturan baru yang harus dilaksanakan dan merubah APBDes, anggaran pendapatan berkurang, serta dana transfer yang terlambat. Hal ini sangat sulit untuk meminimalisir adanya kendala eksternal karena kendala disebabkan oleh pemerintah diatas desa dan bisa diatasi oleh kesadaran pemerintah diatas desa sendiri.

Upaya pemerintah desa dalam mengatasi kendala yang telah dihadapi yaitu untuk kesulitan menentukan prioritas dalam menyelesaikan bisa melihat dengan kondisi yang sedang terjadi, misalnya ada dua kegiatan penting yang pertama pembangunan jalan dan kedua pembangunan jembatan dan keduanya sama penting untuk kebutuhan masyarakat pemerintah desa bisa melihat kondisi jalan dan jembatan meskipun nantinya akan dikerjakan dalam satu periode bersamaan namun hanya waktu yang berbeda. Untuk pagu dana transfer upaya yang dilakukan hanya bisa menunggu mungkin untuk mempercepat pembuatan proposal lebih awal tapi biasanya kalau ada kegiatan mendadak hanya bisa menunggu. Untuk kesulitan membagi anggaran harus teliti dalam menganalisis kegiatan dan dana yang akan masuk tapi pemerintah desa belum maksimal dalam membagi. Lalu untuk keterbatasan tim penyusun karena hanya dijalankan perangkat desa mau tidak mau harus dijalankan dan diselesaikan mungkin hanya butuh waktu yang panjang dan kurang matangnya perencanaan juga tetapi jika sudah menjalankan kegiatan berjalan dengan baik. Untuk peraturan yang berubah – ubah itu pihak desa menyesuaikan saja

### **C. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar**

Berikut adalah penerapan SIA dalam pengelolaan APBDes pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

#### **1. Tahap Penyusunan**

Pada tahap persiapan pemerintah desa yang telah dikerjakan oleh sekretaris Desa Ngembul telah menyusun Rencana Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang disusun sekretaris desa meliputi; Naskah APBDes, Lampiran I Ringkasan APBDes, Lampiran II Rincian APBDes, Lampiran III Penjabaran APBDes, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADes)

Setelah menyusun Raperdes Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari; Naskah APBDes, Lampiran I Ringkasan APBDes, Lampiran II Rincian APBDes, Lampiran III Penjabaran APBDes.

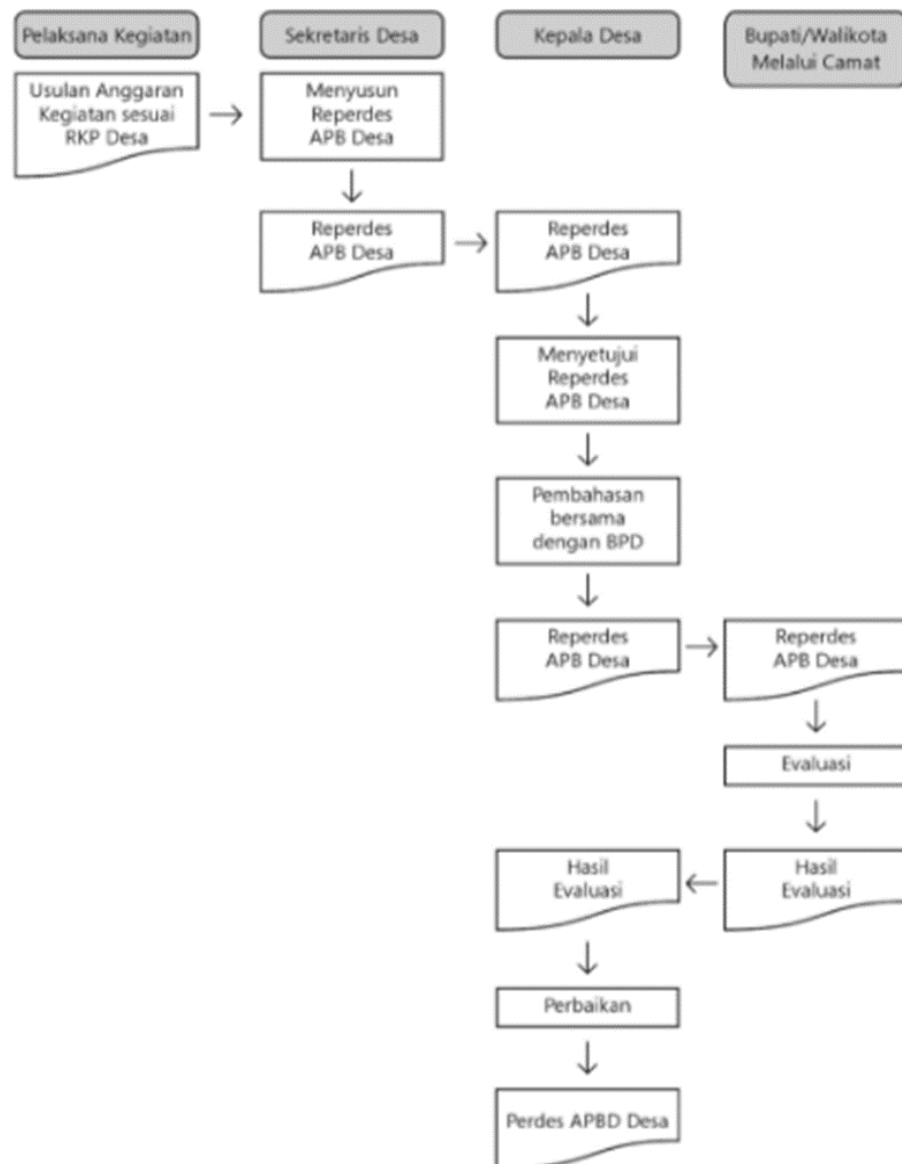
Untuk selanjutnya, dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama disertai surat pengantar dan nota penjelasan rancangan peraturan desa. Penyampaian rancangan peraturan desa tersebut paling lambat satu



bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai peraturan daerah serta persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan peraturan desa tentang APBDes diterima oleh BPD. BPD Desa Ngembul dalam mendukung tahap perencanaan selalu memberikan persetujuan tepat waktu. Dalam melaksanakan APBDes tahun sebelumnya, kepala desa terlebih dahulu menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang APBDes dan dimintakan pengesahan bupati melalui camat.

Selanjutnya pada tahap evaluasi perencanaan, Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lama tiga hari kerja harus disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi serta hasil evaluasi bupati terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan paling lam 20 hari kepada kepala desa.

Pada tahap penetapan hasil evaluasi bupati, kepala desa bersama BPD melakukan penyesuaian rancangan peraturan desa tentang APBDes dan selanjutnya ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa dan peraturan desa yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dikirim kepada bupati/walikota bagian pemerintahan desa dengan tembusan inspektorat daerah bagian hukum dan camat.



Gambar 5.1

Flowchart Penyusunan APBDes Desa Ngembul

## 2. Pelaksanaan APBDes

### a. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

Pelaksanaan anggaran pendapatan desa semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dan kepala desa juga tidak melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang pungutan serta untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun – tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Semua pendapatan desa yang terdiri dari:

- a) Pendapatan asli desa,
- b) Dana desa dari APBN,
- c) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah,
- d) ADD
- e) Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

Dimana semua pendapatan tersebut telah dimasukkan kedalam rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa.

b. Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa

Pelaksanaan anggaran belanja desa juga dilaksanakan dengan tertib untuk menunjang belanja desa. Alur yang pertama setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes diajukan oleh pimpinan kegiatan kepada bendahara desa kemudian bendahara desa

mengajukan pengeluaran belanja kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Sekretaris desa meneliti ajuan SPP dari bendahara desa untuk kemudian diajukan kepala desa untuk disahkan. Selanjutnya kepala desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pemegang rekening kas desa pada bank yang ditunjuk dan pencairan dana bantuan SPM telah diketahui oleh camat dan telah diberikan surat rekomendasi pencairan dana bantuan.

Sebagai pertanggungjawaban atas belanja desa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes telah dibuatkan bukti yang lengkap dan sah serta bukti tersebut telah mendapatkan pengesahan dari kepala desa sebagai pengguna anggaran atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti. Pemerintah Desa Ngembul juga menerapkan pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan sebagai peraturan desa, kecuali untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib. Belanja desa yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Desa Ngembul dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam

tahun anggaran yang bersangkutan (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa).

Pemerintah Desa Ngembul melaksanakan belanja desa yang bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Pelaksanaan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, pemerintah Desa Ngembul telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala desa.

Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDes untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa. Serta dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDes untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengeluaran atas kelebihan penyetoran ke kas desa tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pengeluaran

anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan tanggap darurat bencana alam dilaksanakan dengan mekanisme:

- a) Laporan terjadinya bencana alam/sosial dari kepala dusun
- b) Kepala desa membuat pernyataan bencana alam/sosial
- c) Pengambilan anggaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan keputusan kepala desa
- d) Kepala desa memberitahukan kepada BPD

Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga atas kelebihan setor ke kas desa yang telah ditutup dilaksanakan dengan mekanisme :

- a) Laporan dari pimpinan kegiatan/bendahara desa tentang kelebihan setoran ke kas desa
- b) Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan keputusan kepala desa setelah dilakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran tahun yang bersangkutan

#### c. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa

Pelaksanaan anggaran pembiayaan Desa Ngembul yang dilakukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a) Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja

- b) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung

Dana cadangan telah dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas rekening dana cadangan pemerintah desa dan dana cadangan tidak dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa, pemindahbukuan atau pengembalian dana cadangan paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang dana cadangan serta pemindahbukuan atau pengembalian dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh kepala desa.

Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah dicapai, dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan atau ke desa tersendiri dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke rekening kas desa, dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap

dengan resiko rendah. Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam deposito menambah jumlah dana cadangan, serta pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kemudian penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal.

### 3. Pertanggungjawaban APBDes

Pada tahap pertama sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dimana rancangan peraturan desa tersebut setelah disetujui kepala desa selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Persetujuan bersama dilakukan tidak lebih dari 7 hari terhitung sejak kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Raperdes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan kepala desa menjadi peraturan desa tidak lebih dari 3 hari kerja disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi.

Hasil evaluasi bupati/walikota terhadap rancangan peraturan desa disampaikan tidak lebih dari 20 hari kepada kepala desa sejak diterima, apabila dalam jangka waktu evaluasi, bupati belum menyampaikan hasil evaluasinya maka rancangan peraturan desa



tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa. Dalam evaluasi bupati menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa dan BPD mengadakan penyempurnaan tidak lebih dari 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa kemudian kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota melalui camat tidak lebih dari 14 hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. Laporan yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media berupa:

- a) Laporan realisasi APBDes
- b) Laporan realisasi kegiatan
- c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
- d) Sisa anggaran
- e) Alamat pengaduan

